

Kabupaten Sanggau memsangkan

Ihwal Serapan APBD TA 2010

BPK Didesak Umumkan Hasil Audit

SANGGAU. Desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, mengumumkan hasil auditnya terhadap penggunaan anggaran. Tertuang di APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran (TA) 2010, kian deras mengalir beberapa hari belakangan ini.

Permintaan terhadap BPK-RI tersebut, bukanlah suatu yang berlebihan atau sebuah bentuk intervensi. Tapi, lebih pada untuk sebuah keterbukaan kepada masyarakat di Bumi Dara Nante (julukan Kabupaten Sanggau), sejauh mana realisasi anggaran pada APBD TA 2010 lalu.

"Kita meminta BPK-RI, untuk bisa mengumumkan hasil auditnya secara terbuka kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Soalnya, masyarakat pun berhak untuk mengetahui, bagaimana Pemkab Sanggau dalam mengelola keuangan daerah di tahun

2010 lalu. Ini merupakan bentuk control saja, bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan," ungkap Andriyus Wijaya SE, pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Sanggau, Senin (9/5).

Selain itu lanjut Andre, permintaan untuk mengumumkan hasil audit tersebut, terkait implementasi Undang-undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di mana memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui informasi apapun seputar penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Tak terkecuali termasuk pula pengelolaan keuangan daerah.

"Selama ini, banyak informasi seputar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum disampaikan BPK secara terbuka. Padahal kita berharap, agar BPK mau memberikan informasi kepada masyarakat seputar pengelolaan

keuangan daerah," paparnya.

Dipaparkan Andre, dengan tidak diumumkannya hasil audit secara terbuka dan transparan. Tentunya merupakan bentuk hambatan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Di mana selama ini, haus terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

"Bagus atau jeleknya, hasil audit tersebut. Masyarakat hanya paling-paling bisa berharap di kemudian hari bisa menjadi koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan keuangan selanjutnya," cetus Sekretaris PKPB ini.

Malahan, kata Andre, dengan tidak diumumkan ke publik, maka bisa menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum. Sekaligus terhadap implementasi UU KIP itu sendiri. "Kita sangat

berharap, BPK mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kabupaten Sanggau ini. Saya rasa, pun tak bertentangan dengan etika selaku auditor," pungkasnya.

Terpisah Abang Indra, ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kabupaten Sanggau mengungkapkan hal serupa dan meminta BPK-RI melaksanakan pengumuman hasil audit terhadap penyerapan APBD Sanggau Tahun 2010 lalu. "Mestinya BPK mengumumkan hasilnya. Minimal



M. Khusyairi/Equator

Y Andriyus Wijaya SE.

melalui rapat dengan DPRD yang merupakan perpanjangan tangan rakyat," pintanya.

Parah lagi sambung Indra, jika tidak diumumkan. Jelas akan membentuk opini di masyarakat terhadap lembaga tersebut. "Masyarakat tidak tahu hasil auditnya.

Jadi wajarlah masyarakat bertanya-tanya. Bagaimana realisasi dan penyerapan

dana yang tertuang dalam APBD Sanggau TA 2010 lalu.

Apakah, sudah bagus atau malah sebaliknya. Ini yang mau diketahui masyarakat," pungkasnya. (SrY)